

SUDAH DIHENTIKAN TAPI TETAP BUKA

Pemkot Bogor Ambil Langkah Hukum Terhadap GLOW di KRB

BOGOR (IM)- Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta menegaskan Forkopimda bersama Pemkot Bogor beberapa waktu lalu sudah memutuskan menghentikan sementara kegiatan GLOW di Kebun Raya Bogor (KRB).

Perihal dipaksakannya GLOW tetap dibuka oleh PT Mitra Natura Raya (MNR), Pemkot Bogor akan mengambil langkah hukum.

Alma memaparkan, dengan merebaknya persoalan penolakan penghentian kegiatan wisata malam GLOW KRB yang dikelola PT. MNR dan yang mana sebelumnya kebijakan Pemkot Bogor dibalas dengan surat tertanggal 30 September 2022 lalu kepada Wali Kota Bogor mengindikasikan maksud untuk mengadu domba dengan Presiden dan BRIN.

"Kewenangan Pemerintah Kota Bogor yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai otonomi daerah untuk mengatur di wilayah terkait urusan pemerintahan bidang kebudayaan, hal ini merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, rujukan regulasi dapat dibaca dalam lampiran bagian V angka 5, juncto Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2011

tentang Kebun Raya, yang tentunya kewenangan tersebut salah satunya dalam pembangunan infrastruktur pendukung harus memperhatikan aspek sosial, budaya, kearifan lokal, keamanan, keterbacaan, estetika dan daya dukung kawasan termasuk dampak lingkungan," tegas Alma, Rabu (5/10).

Alma melanjutkan, Pemkot Bogor dapat mengambil langkah hukum sesuai kewenangan yang melekat, apalagi cukup banyak elemen masyarakat Kota Bogor dan sekitar yang berbentuk aliansi peduli kebun raya dan beberapa lawfirm mendukung kebijakan Pemkot Bogor bersama Forkopimda.

"Aliansi juga akan melaporkan adanya peristiwa pelanggaran dari UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tentunya Pemerintah Kota Bogor bersama masyarakat akan mengawal kebijakan tersebut sesuai regulasi," tuturnya.

Sementara itu, General Manager Corporate Communication dan Security PT MNR Kebun Raya Bogor, Zaenal Arifin belum merespon saat dikonfirmasi. Hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak PT. MNR. Wartawan sudah berusaha menelepon dan menanyakan via WhatsApp, namun tidak ada respon. ● **gio**

JELANG PORDA DAN PEPARDA JABAR 2022

Rudy Susmanto Usulkan Ketua Cabor dan Managernya Dapat Bonus

BOGOR (IM)- Jelang ajang Porda dan Peparada Jawa Barat (Jabar) 2022, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengusulkan pemberian bonus keolahragaan juga meliputi ketua cabang olahraga (Cabor) dan Manager Cabor.

Rudy Susmanto mengatakan bahwa bonus keolahragaan mestinya tidak hanya kepada para atlet dan pelatih saja, karena ketua dan manajer Cabor juga punya andil dalam mengangkat prestasi para atletnya. "Jangan anggap sepele peran ketua dan manager Cabor yang akan menghadapi event olahraga seperti Porda dan Peparada Jabar 2022," kata Rudy Susmanto, Rabu (5/10).

Wakil Sekjend DPP Partai Gerindra ini menuturkan, bahwa ketua dan manager Cabor adalah sosok di belakang layar, dibalik keberhasilan para atlet dalam meraih prestasi.

Hal yang sangat wajar, papar Rudy Susmanto, jika Pembak Bogor memberikan apresiasi kepada ketua dan manager Cabor yang berprestasi pada ajang Porda dan Peparada Jabar 2022 pada Bulan November mendatang

Namun, sebelumnya harus dilakukan bentuk parameter atau acuan kriterianya seperti apa yang akan jadi patokan dalam memberikan bonus kepada ketua dan manager Cabor yang berprestasi, terutama yang telah atau melebihi target raih medali emas.

"Mungkin untuk bonus bagi Ketua dan Manager Cabor bisa dalam bentuk pemberian tiket umroh," ucap Rudy.

Di samping itu, Pemkab Bogor sebenarnya bisa memberikan bonus atlet dan pelatih sama dengan yang diberikan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. "Idealnya bonus satu emas atlet Kabupaten Bogor bisa di angka Rp 150 juta dan untuk pelatih bonus satu emasnya di angka Rp 50 juta dan semua kali keping," paparnya.

Rudy Susmanto melanjutkan alangkah lebih bagusnya pemberian bonus untuk atlet dan pelatih di Kabupaten Bogor mengacu pada rumusan presentase pemberian bonus atlet dan pelatih yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga. ● **gio**

IDN/ANTARA



INOVASI SISWA PROGRESIF BUMI SHOLAWAT SIDOARJO

Sejumlah siswa menunjukkan tempat sampah yang terintegrasi dengan aplikasi di SMA Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (5/10/2022). Tim peneliti muda Indonesia dari SMA Progresif Bumi Shalawat meraih Medali Emas dalam ajang International World Invention Competition and Exhibition (WICE) yang digelar Segi University di Kota Damansara, Malaysia tersebut mengembangkan teknologi tempat sampah yang terintegrasi dengan aplikasi "Samti" guna memilah sampah secara otomatis.

TP-PKK Desa Sukamaju Masuk Enam Besar Tingkat Provinsi Jabar

BOGOR (IM)- TP-PKK Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor masuk enam besar lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bogor, Halimatusadiyah Iwan bersama TP-PKK Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, lakukan persiapan jelang penilaian rechecking yang akan dilakukan tim penilaian dari Provinsi Jawa Barat pada Rabu (5/10).

Untuk diketahui, berdasarkan hasil perlombaan 10 Pokok Program PKK tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022, dari 8 desa terpilih, Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung men-

jadi TP-PKK Desa Terbaik dalam Lomba 10 Pokok Program PKK tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Dan berhasil maju mewakili Kabupaten Bogor ke tingkat Provinsi Jawa Barat.

Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, Halimatusadiyah Iwan mengatakan, bangga dan apresiasi atas prestasi dan kerja nyata TP-PKK Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung.

Disampaikan, hari ini pihaknya gladi resik untuk mempertahankan kesiapan, karena esok tim rechecking dari Provinsi Jabar akan melakukan penilaian. "Kami berharap TP-PKK Desa Sukamaju bisa memberikan yang terbaik dan menjadi juara, untuk mengharumkan nama Kabupaten Bogor," imbuh Halimatusadiyah. ● **gio**

8 | Nusantara

KONDISI NYARIS AMBRUK

Disdik Kab. Bogor Diminta Segera Renovasi SDN Pasir Jaya

Kepala Sekolah SDN Pasir Jawa 2, Suryadi Uryani sudah berupaya mengusulkan agar pihak Disdik Kabupaten Bogor segera merenovasi bangunan sudah lapuk. Namun sejauh ini, belum ada tanda-tanda pihak dinas melakukan renovasi.

BOGOR (IM)- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, diminta segera memberikan perhatian kepada SDN Pasir Jaya. Pasalnya, kondisi SDN Pasir Jaya 2 di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Jawa Barat.

Bahwa, gedung sudah mulai lapuk, tak beratap, bangunan mulai kusam dan tembok rontok termakan usia.

Karena kondisi yang sangat mengkhawatirkan, diminta agar Disdik Kabupaten Bogor melakukan rehabilitasi pada bangunan SDN tersebut.

Sebagaimana tampak di lokasi, salah satu bangunan perpustakaan sekolah rusak berat dan nyaris roboh di beberapa bagian dindingnya.

Kadaan serupa kondisi meubeler yang dipergunakan para peserta didik dan para guru sudah sangat tidak layak untuk digunakan.

Sudah barang tentu, sangat berpengaruh terhadap kualitas mutu pendidikan.

Termasuk plafon ruang kelas yang menggantung mengancam keselamatan jiwa para peserta didik maupun tenaga pengajar.

Apalagi jika hujan turun Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

terganggu, salah satu alternatif dievakuasi ke sekolah madrasah yang lokasinya berdekatan dengan sekolah SDN itu.

Kepala Sekolah SDN Pasir Jawa 2, Suryadi Uryani mengatakan, atas kondisi sekolah tersebut, pihaknya sudah berupaya untuk mengusulkan agar pihak Disdik Kabupaten Bogor segera merenovasi bangunan sudah lapuk.

Namun sejauh ini, menurutnya, belum ada tanda-tanda pihak dinas segera melakukan renovasi di gedung SDN ini.

Sempat diperoleh kabar, ujar Suryadi, sekolah ini akan mendapat bantuan pembangunan pemagaran, bangunan perpustakaan sekolah dan meubeler. "Sayang bentuk bantuan diharapkan secepatnya ada kepastian kapan akan segera direalisasikan," kata Suryadi Kepala SDN Pasir Jaya, kepada wartawan, Rabu (5/10).

Pada bagian lain, Suryadi juga mengeluhkan tentang kelambatan pencairan Dana Operasional Sekolah (BOS).

Hal ini mempengaruhi kegiatan KBM di sini, mengingat keberadaan SDN ASN di sekolah ini hanya 1 orang dan P3K 1 orang dan sukwan di sekolahnya sebanyak 4 orang. ● **gio**



SDN Pasir Jawa Cigombong, Kabupaten Bogor, yang nyaris ambruk.

Kemenkes Pilih Bogor Jadi Pilot Project Kawasan Tanpa Rokok

BOGOR (IM)- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) memilih Kota Bogor sebagai pilot project atau proyek perubahan penerapan Dashboard Pemantauan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kota Bogor dipilih sebagai pilot project karena dianggap sudah baik dalam penerapan KTR, baik dari sisi regulasi ataupun konsistensi pengawasannya.

"Di Kota Bogor ini sudah baik (penerapan KTR). Makanya kita menjadikan Kota Bogor itu sebagai pilot project sebagai dashboard itu secara nasional," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Ditjen P2P, Kemenkes, Eva Susanti, kemarin.

Eva melanjutkan, secara nasional Kota Bogor sudah bisa melakukan sembilan tatanan dalam aspek melakukan pengawasan terhadap penerapan KTR dengan hasil sangat baik. Dari sembilan kabupaten/kota di Indonesia yang dipilih untuk menerapkan dashboard ini, Kota Bogor merupakan kota pertama.

Karena kata Eva, Kota Bogor bisa menjadi percontohan kota-kota lain dari sisi regulasi ataupun pengawasannya.

"Sehingga dengan dipilihnya beberapa kota secara nasional ini akan dijadikan contoh untuk bisa melakukan monitoring terpadu penerapan KTR," katanya.

Dengan sistem dashboard terpadu ini penerapan KTR dan pengawasannya bisa dilakukan pemantauan secara nasional oleh pemerintah pusat kepada setiap provinsi, pemerintah provinsi kepada setiap kabupaten/kota dan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada wilayah kecamatan.

Dengan dashboard ini juga setiap kota nantinya akan melakukan input data penerapan KTR dari sisi regulasi, penerapan, pengawasan dan sebagainya sehingga bisa mencapai penilaian kepatuhan terhadap wilayah KTR. Ke depan, lanjut Eva, kota yang akan menjadi pilot project dengan Kota Bogor yang pertama ini akan menjadi kota percontohan dalam implementasi KTR yang baik.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan dari sisi regulasi Kota Bogor sudah memiliki peraturan daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok. Perda KTR di Kota Bogor sudah ada sejak tahun 2009 yang kemudian diperbarui pada tahun 2018 Perda

Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

"Kota Bogor memiliki pondasi yang cukup kuat untuk persoalan KTR, jadi pertama itu regulasi yang mendasari semua dan kita selalu update," ujarnya. Pembaharuan tersebut kata Bima Arya dilakukan untuk terus melakukan updating data kondisi dan situasi terbaru, baik dari sisi kampanye dan promosi ataupun produk rokok. Karena saat ini selain rokok konvensional juga ada berbagai rokok elektrik ataupun vape yang bermunculan.

Sehingga dengan adanya pembaruan Perda tersebut, dapat mengatur terkait aturan bentuk rokok lainnya. Tak hanya itu segala bentuk media iklan spanduk, billboard, baliho dan sebagainya yang berhubungan dengan produk rokok tidak diperkenankan.

Setelah Perda KTR Kota Bogor ini masif dilakukan sosialisasi dan edukasi, kata Bima Arya, kepedulian masyarakat sudah semakin tinggi. Warga pun sudah banyak yang melaporkan adanya pelanggaran KTR, baik melalui media sosial ataupun aplikasi pengaduan milik Pemkot Bogor. ● **gio**

19 Titik Batas Wilayah Kota Bogor-Kabupaten Akan Disesuaikan Ulang

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Universitas Pakuan mengkaji 19 titik batas wilayah dengan Kabupaten Bogor. Batas wilayah itu dinilai perlu disesuaikan ulang secara definitif dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2014 untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rudy Mashudi mengatakan penyesuaian batas wilayah memerlukan kajian aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

"Kajiannya harus secara akademis dulu, kemudian diajukan, kita terima di pemerintah kota dan harus ada kesepakatan kedua pemerintahan kota dan Kabupaten Bogor berupa berita acara, kita ajukan ke Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Rudy, Rabu (5/10).

Forum group discussion (FGD) soal batas wilayah Pemkot Bogor bersama Universitas Pakuan itu digelar di Universitas Pakuan. Diskusi dihadiri Rektor Universitas Pakuan Bibin Rubini serta Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Sugiarto.

Rudy mengatakan, pada 19 titik wilayah 'abu-abu' itu, berdasarkan Permendagri Nomor 107 Tahun 2014, terdapat wilayah yang masuk Kota Bogor dari sisi pelayanan, namun secara administratif merupakan wilayah

Kabupaten Bogor. Kondisi sebaliknya juga terjadi.

Penyesuaian batas wilayah tersebut bergantung pada kebijakan wali kota dan bupati Bogor. Jika bersepakat menyesuaikan batas wilayah, pengajuan berita acara untuk perubahan hal tersebut dapat diproses dan ditetapkan dalam permendagri.

Selain kebijakan kepala daerah, kata Rudy, hal terpenting lain ialah faktor keinginan masyarakat yang lebih nyaman masuk ke wilayah kota atau Kabupaten Bogor.

Menurutnya, yang menjadi faktor utama aspirasi penyesuaian batas wilayah warga yakni pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan, dan ekonomi yang lebih dekat dengan tempat tinggal.

"Contoh di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, ada sebagian wilayah berbatasan dengan Kabupaten Bogor yang ada juga," ujar Rudy.

Dia juga menyampaikan, jika proses komunikasi dan pembahasan batas wilayah tingkat pemerintah kota dan Kabupaten Bogor cepat dilakukan, perubahan permendagri untuk penyesuaian dapat dilakukan kurang dari satu tahun.

"Tadi seperti disampaikan pak direktur, kalau kesepakatan cepat, berita acaranya sudah ada, bisa kurang setahun selesai," jelasnya. ● **gio**

Ketua DPRD Apresiasi Liga Santri Wali Kota Tangerang Cup 2022

TANGERANG (IM)- Kompetisi sepakbola Liga Santri Wali Kota Tangerang Cup 2022 yang diinisiasi oleh Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Tangerang telah dibuka pada Senin (3/10) lalu di Stadion Benteng Reborn.

Liga Santri 2022 digelar dalam rangka menyambut peringatan Hari Santri 2022 yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober, namun dalam kesempatan tersebut FSPP menggelar Liga Santri itu bulan ini dan diikuti sebanyak 20 klub sepakbola dari berbagai pondok pesantren yang ada di Kota Tangerang.

Gatot Wibowo, Ketua DPRD Kota Tangerang saat ditemui mengatakan sangat mengapresiasi adanya kegiatan pertandingan sepak bola karena sangat positif sekali dan sebagai ajang silaturahmi para santri-santri yang ada di pondok pesantren yang ada di Kota Tangerang.

"Sebagai warga Kota



Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah dan Ketua DPRD, Gatot Wibowo, para santri dan pejabat lainnya dalam acara Kompetisi sepakbola Liga Santri Wali Kota Tangerang Cup 2022.

Tangerang kita turut berbahagia dengan Hari Santri ini. Banyak kegiatan positif yang diisi oleh teman-teman santri di Kota Tangerang," katanya saat di temui di Stadion Benteng, Senin (3/10).

Dikatakan Gatot, kegiatan olahraga seperti sekarang ini agar menjadi contoh yang baik serta

dapat menghasilkan ide dan gagasan cemerlang agar bisa terus berbuat baik untuk Kota Tangerang.

"Ini patut dicontoh," katanya.

Sementara, hal sama diutarakan Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, menurutnya gelaran Liga Santri 2022 yang pertama kali diselenggarakan di Kota Tangerang ini menjadi

wujud perhatian dan kepedulian dari para pengurus pondok pesantren dalam memberikan kebahagiaan bagi para santrinya. "Dan sudah seharusnya Pemkot memfasilitasi, salah satunya dengan penggunaan stadion yang menjadi kebanggaan warga Kota Tangerang," tuturnya.

Sebagai informasi, liga santri

tersebut diikuti oleh 20 tim sepakbola yang tergabung di Pongpes se Kota Tangerang. Adapun hadiah yang dipersembahkan adalah uang pembinaan, dan trophy. Untuk juara 1 mendapatkan Rp9 juta, juara 2 mendapatkan Rp6,5 juta, juara 3 mendapatkan Rp4,5 juta. ● **joh**